

BAB II

FENOMENA RASISME DI EROPA

Bab II merupakan bab yang berisi penjelasan tentang fenomena rasisme yang terjadi di Eropa. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan ulasan tentang sejarah rasisme di Eropa. Kemudian dilanjutkan dengan perilaku yang mendasari terjadinya fenomena rasisme. Setelah itu pembahasan akan menuju pada contoh kasus rasisme yang terjadi di Italia, Jerman dan Prancis.

Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data mengenai sejumlah hal yang terkait dengan rasisme. Baik itu merupakan pidato bernada rasis dari beberapa pejabat negara anggota Uni Eropa maupun kasus-kasus kriminalitas bermotif rasisme yang dilakukan warga biasa, serta menyelipkan tentang perkembangan gerakan “ultra kanan” yang cenderung rasis di Uni Eropa.

A. Sejarah Rasisme Di Eropa

Banyak pemikir berpendapat bahwa sejarah dunia adalah sejarah rasisme. Keyakinan itu dipegang berdasarkan analisis perilaku tak manusiawi di masa lampau dari kalangan kulit putih terhadap orang-orang kulit berwarna. Manifestasi yang paling konkrit dan umum adalah tindakan perbudakan. Contoh lain yang sangat nyata tidak manusiawinya dan barangkali belum diketahui banyak orang adalah kebun binatang manusia atau “Human zoo”.

Human zoo merupakan pertunjukan anggota suku asli Asia, Afrika, dan Amerika Selatan yang dimasukkan ke dalam sebuah kandang, selayaknya kebun binatang, yang pernah populer di Eropa dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Menurut seorang Antropolog yakni Shoshi Parks, asal-usul Human Zoo berawal dari kelahiran pertunjukan sirkus di London pada 1770-an. Sirkus tidak hanya memamerkan kemampuan atletis atau hewan eksotis, tetapi juga orang aneh.

Konsep “aneh” dalam kepala orang Eropa kemudian berkembang. Tidak hanya untuk orang yang lahir dengan kondisi fisik tidak wajar, namun juga suku-suku asli dari luar Benua Biru

dengan warna kulit, kebudayaan, dan gaya hidup yang berbeda. Ideologi tersebut sesuai dengan rasisme yang melekat pada tindakan kolonialisme Eropa. Human Zoo adalah etalase untuk menunjukkan klaim bahwa strata orang kulit putih sebagai penjajah lebih tinggi dan lebih beradab dibanding orang kulit berwarna “primitif” sebagai yang terjajah.

Pelopop kebun binatang manusia tersebut adalah Carl Hagenbeck, wirausahawan binatang eksotis asal Jerman. Ia memiliki reputasi yang bagus karena kepiawaiannya dalam mendapatkan binatang liar di pertengahan 1800-an. Ketika itu kebun binatang di Eropa banyak yang disuplai oleh hasil buruannya.

Pada suatu hari, ia disarankan temannya untuk membawa serta orang suku asli yang paham soal binatang eksotis. Hagenbeck menyambutnya sebagai ide brilian. Ia kemudian membawa serta orang suku Sami asal Skandinavia bersama rusa kutub Utara yang hendak ia pameran dalam pertunjukan Human Zoo tersebut.

Hagenbeck kemudian merubah sebagian kecil lahannya, menjadi persis seperti tempat tinggal orang Sami, termasuk rumah tradisional dan aksesoris pelengkapannya. Orang-orang Sami dibiarkan hidup sebagaimana mereka biasa menjalankan aktivitas harian di tempat asal beserta ritual khas mereka. Selain binatang-binatang eksotis, orang-orang Sami ini kemudian menjadi daya tarik yang luar biasa bagi warga Jerman yang belum pernah melihat orang “primitif”. Hagenbeck mengklaim hal tersebut adalah pertunjukan kebudayaan asing.

Seiring membludaknya penonton pertunjukan Human Zoo, negara kapitalis Eropa lain melihatnya sebagai peluang mendapatkan uang hingga terjadi upaya untuk membuat kebun binatang manusia juga yang muncul pada tahun 1830-1840-an dan popularitasnya memuncak sejak 1870 era Imperialisme Baru. Human Zoo makin sering dipertunjukkan di Paris, Hamburg, Berlin, London, Barcelona, Milan, New York dan kota-kota besar di Eropa dan Amerika Serikat.

Pesaing Human Zoo Hagenbeck mempertunjukkan kebun binatang yang berisi manusia asli Madagaskar, Senegal, hingga Suriname. Ada pula yang membawa orang-orang pribumi dari

wilayah Asia, terutama Srilanka, India, dan suku asli di Filipina. Amerika Tengah dan Selatan sebagai wilayah yang pertama kali dieksplorasi kolonial Eropa pun juga tak luput dari bisnis ini. Orang suku asli di Cile hingga ke Puerto Rico diboyong untuk dipamerkan di “world fair” yang diselenggarakan di Saint Louis, AS, hingga ke Antwerp, Belgia.

Adanya tindakan rasisme di Eropa tidak terlepas dari yang namanya *Blackface*, yang diartikan sebagai praktik orang-orang non-kulit hitam (biasanya kulit putih) yang menggelapkan kulit mereka dalam upaya yang, sekali lagi, disengaja untuk meniru kulit hitam. Praktik *blackface* sudah muncul sejak lama dan merupakan bagian kelam dari adanya segregasi rasial. Praktik *blackface* awalnya adalah instrumen teatrical Eropa kuno. Di Eropa, alih-alih dipakai sebagai penanda rasial, *blackface* semata digunakan untuk membedakan dua dimensi antara putih dan hitam. Putih berarti cahaya, hitam berarti bahaya.

Jadi saat itu di Eropa jika ada pemain yang diwarnai hitam, itu bukan berarti mereka hendak mengatakan bahwa mereka berasal dari Afrika. Itu adalah cara mereka untuk mengatakan bahwa mereka adalah makhluk malam atau makhluk kegelapan. Ketika tiba di AS pada abad 18, makna *blackface* turut bergeser. Ia dipakai untuk menunjukkan kedudukan sosial. Awalnya, *blackface* banyak digunakan oleh kelompok kulit putih miskin dan kelas pekerja asal Irlandia yang tinggal di New York. Mereka meniru kulit hitam karena mereka tinggal bersama kelompok kulit hitam di tangga sosial yang sama.

B. Perilaku Yang Mendasari Rasisme

Eropa yang merupakan benua yang sudah maju dengan menerapkan prinsip-prinsip integrasi kawasan dan sudah diwujudkan dengan terbentuknya Uni Eropa. Uni Eropa diakui sebagai salah satu bentuk integrasi kawasan yang paling baik di dunia namun tetap tidak lepas dari bayang-bayang fenomena rasisme. Terjadinya fenomena rasisme di Eropa bukanlah hal yang benar-benar baru. Pada dasarnya, sebagian masyarakat Eropa memiliki sifat *nativism*. Nativism adalah suatu bentuk ideologi dalam praktek politik yang bertujuan melindungi atau

mengistimewakan warga sendiri dalam satuan negara bangsa dan cenderung anti terhadap bentuk-bentuk migrasi. (ENAR, 2016)

Dalam konteks ini, paham nativism tersebut cenderung mengarah pada rasisme. Sejak tahun 2015, banyak orang berdatangan menuju Eropa untuk menghindari konflik bersenjata atau mencari penghidupan yang lebih baik. Sayangnya, orang-orang ini ketika tiba di daratan Eropa atau akan mencapai daratan Eropa, mendapatkan perlakuan diskriminatif karena perbedaan mereka dengan warga Eropa. Baik itu perbedaan warna kulit, agama, kebangsaan dan hal-hal lainnya.

Pada skala tertentu, beberapa negara anggota Uni Eropa menerapkan kebijakan-kebijakan kontroversial yang berbau rasial terhadap orang-orang yang diyakini tidak mampu beradaptasi dengan nilai-nilai negara itu. Kebijakan itu dapat berupa pembatasan atau pelarangan masuknya orang asing. Selain itu, ada juga pidato bernada rasial yang dilakukan kepala negara dan menargetkan kelompok tertentu. Tercatat menurut shadow report on racism yang dikumpulkan oleh ENAR melalui berbagai sumber, perilaku-perilaku dengan kecenderungan ini terdapat di berbagai sektor. Contohnya ada di sektor *Labour market*, narasi politik dan kebijakan publik, bahkan dalam sektor peradilan.

C. Rasisme Di Uni Eropa

Adanya restriksi terhadap orang-orang yang memasuki kawasan Eropa dalam bidang pekerjaan berdampak terhadap kerentanan pada eksploitasi para imigran, yakni dipekerjakan secara sewenang-wenang tanpa penghargaan yang pantas. Pada beberapa kasus, orang-orang asing yang memasuki Eropa sebagai migran atau pengungsi, tidak diijinkan untuk bekerja sesuai periode tertentu, namun hanya diijinkan untuk bekerja dengan jam kerja maksimal. Pilihan pekerjaan yang tersedia didasarkan pada prinsip perekrutan sementara tenaga kerja asing yang menyuratkan aturan izin tinggal sementara yang ketat, jenis pekerjaan yang spesifik di salah satu negara anggota Uni Eropa serta dengan perusahaan atau pemberi kerja yang jelas.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar dari hak-hak pekerja, termasuk pekerja rumah tangga bahkan pekerja yang tidak berdokumen, seperti pembayaran gaji yang adil, kompensasi

untuk biaya kesehatan dan jika terjadi kecelakaan, serta hak berlibur atau cuti, dijamin dalam hukum internasional. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut cenderung sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, menurut hukum nasional masing-masing. Sehingga seringkali, tenaga kerja asing di Uni Eropa yang tidak memiliki dokumen lengkap atau tanpa dokumen mengalami pelanggaran hak pekerja termasuk gaji di bawah standar minimum, jam kerja panjang tanpa kompensasi, waktu istirahat yang terbatas, lingkungan kerja yang tidak nyaman dan kehidupan yang tidak memadai, bahkan penyitaan dokumen identitas pribadi seringkali juga terjadi ancaman psikologis dan kekerasan fisik. (picum.org/uploads/publication, 2017)

Proses pendataan yang ketat bagi pekerja asing, dan cenderung yang bersifat rasial, membuat orang-orang ini rentan menjadi korban dari praktik kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan manusia, penyelundupan, bahkan prostitusi. (European Network Against Racism, 2017, hal. 36)

Dalam kasus ini, wanita dan anak-anak cenderung lebih rentan dibandingkan orang dewasa lainnya. Sebagai contoh, wanita dengan asal usul asing bukan dari negara-negara Eropa seringkali tidak mendapat pekerjaan yang layak. Sekalipun mendapat pekerjaan, wanita-wanita ini sering ditempatkan di sektor informal yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi.

Kesulitan kesulitan orang-orang asing non Eropa mengakses lapangan pekerjaan di Eropa terbentuk karena adanya persepsi dan stereotipe tentang asal mereka. Orang-orang ini juga kerap ditempatkan di sektor pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan dengan alasan 'melindungi' lapangan pekerjaan bagi warga negara. Contoh, pada tahun 2015, dikutip dari *shadow report* yang ditulis ENAR,

Adanya fenomena ini yang terjadi di era modern, dapat dikatakan sebagai langkah mundur Eropa yang sejak lama mengusahakan integrasi kawasan dimana yang dikampanyekan adalah kesetaraan hak-hak sipil di antara warganya tanpa ada pembedaan-pembedaan tertentu. Pada aspek kebijakan publik dan narasi politik, orang-orang yang dapat dikatakan sebagai

kelompok minoritas di Eropa, seringkali menjadi target dari retorika-retorika bernada rasis.

Hal-hal tersebut terjadi juga karena andil media yang banyak menyebarkan berita secara tidakimbang. Menurut ENAR, berita yang berimbang mengenai orang-orang yang memasuki Eropa yang berasal dari negara asing dan memiliki keyakinan berbeda dengan mayoritas rakyat Eropa, akan mengurangi perilaku rasis ataupun ujaran-ujaran kebencian terhadap orang-orang ini. Bahkan, dapat mengurangi perilaku *xenophobic*. Sayangnya, sebagian media-media mainstream di Eropa secara tidak langsung turut memberitakan hal-hal negatif terhadap orang-orang yang menjadi migran tersebut.

Sehingga, perilaku rasis dan diskriminasi terhadap migran ini meningkat. Bahkan, menurut ENAR, media seperti telah dipekerjakan untuk menyebarkan kebencian dan rasisme hingga skala yang di luar nalar. Menurut pendapat ENAR yang tertulis dalam bahasa Inggris dalam *shadow report*, The co-option of mainstream media is evident by the normalisation of racist and xenophobic positions. (European Network Against Racism, 2017, hal. 14)

Pengelompokan berdasarkan etnis dalam sektor pekerjaan, menyuburkan praktek *prejudice* dan anggapan-anggapan bernada rasial bahwa individu atau sekelompok dari golongan-golongan tertentu hanya cocok dalam pekerjaan tertentu dan tidak mampu melebihi kemampuannya.

Selain itu juga terjadinya kejahatan bermotif rasis terhadap para pendatang di Benua Eropa. Serangan bermotif rasis terhadap migran pencari suaka, pengungsi dan akomodasi mereka di negara-negara anggota Uni Eropa, dimotori oleh serangan teroris di Eropa dan kebijakan politik dan publik yang mengandung kebencian terhadap migran. Hal ini banyak dilaporkan oleh organisasi masyarakat sipil, media, serta organisasi Internasional di seluruh Uni Eropa. Ada bukti kuat bahwa kejadian-kejadian yang dilaporkan secara resmi hanyalah puncak gunung es. (European Network Against Racism, 2017, hal. 40)

Hal-hal ini terjadi karena biasanya, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan ini termotivasi oleh berbagai

retorika anti migran atau retorika-retorika bernada rasis lainnya yang diperparah dengan munculnya berbagai protes dan demonstrasi anti Migran di negara-negara Eropa. Secara umum, suasana ini membangkitkan kecenderungan pembentukan kelompok-kelompok yang terafiliasi ideologi ekstrim kanan. Serta meningkatkan jumlah aktivitas negatif ini yang sudah ada sebelumnya. Tidak hanya fenomena ini yang menimbulkan *concern* bagi organisasi ENAR, di beberapa negara anggota Uni Eropa terjadi *ethnic profiling* yang diyakini sebagai tindakan ilegal terhadap orang-orang dari golongan kulit berwarna atau berdasarkan kebangsaan yang tertera di paspor.

D. Contoh Kasus Rasisme Di Berbagai Negara Eropa

1. Italia

Tindakan rasisme bukanlah menjadi hal yang baru di Italia. Kasus rasisme paling banyak didapati dalam dunia sepakbola, khususnya supporter. Salah satu contohnya yakni pada tahun 2013, Mario Balotelli yang ketika itu membela tim AC Milan diteriaki dengan sebutan ‘monyet’ oleh pendukung club rival satu kota yakni Inter Milan. Inter pun kemudian dijatuhi hukuman denda senilai 50 ribu euro. Selain itu pada akhir musim 2016/2017, Antonio Rudiger yang berseragam AS Roma juga menjadi sasaran rasisme pendukung rival sekota, Lazio. Dua kasus ini hanya contoh kecil dan masih banyak lagi insiden rasisme di Italia yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Rasisme memang bukan barang baru di sepak bola Italia. Pada era 1990an, nama tenar seperti Paul Ince juga pernah mengalami pelecehan rasis puluhan tahun sebelumnya, ketika rasisme belum menjadi perhatian dunia seperti sekarang, rekam jejak memalukan itu bahkan sudah disusun terang-terangan. Saat itu, pada musim 1992/1993 dua pemain berkulit hitam Belanda, Ruudi Gullitt dan Aaron Winter menjadi korban rasisme saat masih merumput di Italia.

Rasisme sudah mengakar kuat dan berbunga lebat di belantika sepak bola Italia. Jika melihat dari sejarahnya, rasisme memang sudah melekat di kehidupan sosial

masyarakat Italia. Pada era 1930an, di bawah pimpinan Benito Mussolini, terdapat undang-undang yang melegalkan praktik persekusi terhadap penduduk Yahudi Italia dan melarang imigran masuk ke negara yang berbatasan langsung dengan Perancis tersebut. Sedangkan di era modern, pada 2017, survei yang dilakukan oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa Italia merupakan negara paling rasis di Eropa Barat. (Kompas.com, 2018)

Salah satu kelompok supporter yang dikenal sangat rasis adalah supporter garis keras Club Verona. Kelompok supporter ini tak pernah luput melakukan nyanyian “monyet” setiap kali pemain lawan yang berkulit hitam menyentuh bola di Stadion Verona, Bentegodi. Jika ditelusuri secara historis, kebiasaan fans Verona tersebut sebetulnya ada sangkut pautnya dengan kehidupan sosial di Verona di masa lampau. Pendukung Verona pernah punya hubungan kuat dengan kekaisaran Austro-Hungaria, mendukung penuh pemerintahan *fasis*, dan juga berafiliasi dengan kelompok separatis *Lega Nord*. Dengan rekam jejak sejarah seperti itu, maka tak heran apabila orang-orang Verona anti terhadap orang-orang “asing”. Orang-orang Verona bahkan tak menyangkal apabila mereka membenci imigran. Mereka berpikir bahwa para imigran terutama yang berkulit hitam, hanya akan menjadi pengacau. Mereka pun lantas punya pertanyaan seragam setiap kali orang asing ingin datang ke Verona yakni “dia berkulit hitam atau putih?”

Seorang jurnalis Amerika, Wright Thompson, pernah melakukan investigasi soal budaya rasis dalam sepakbola Italia. Dalam tulisannya yang berjudul “When The Beautiful Games Turns Ugly”, Thompson mendapatkan penjelasan dari James Waltson, ahli politik dan sejarah Italia, bahwa rasisme di sana berkaitan dengan pemujaan terhadap Benito Mussolini. Semua bermula ketika Silvio Berlusconi, mantan Perdana Menteri Italia, menggandeng partai-partai konservatif ke dalam pemerintahannya pada tahun 1991 silam. Ia merehabilitasi kaum fasis, menghidupkan kembali mereka di tengah-tengah masyarakat Italia, bahkan mengangkat Alessandra Mussolini, cucu perempuan

Mussolini, ke kursi senat. Berlusconi menilai bahwa Mussolini bukanlah sosok yang buruk. Bahwa undang-undang rasial yang ia bikin adalah sebuah kesalahan, tapi Mussolini tetaplah pemimpin terbaik Italia.

Badan pengawas anti diskriminasi sepakbola eropa (FARE) menilai Italia diserang wabah rasisme di dalam stadion –stadion sepakbola dimana hal ini dipengaruhi atau tersulut oleh politik sayap kanan dan hal ini dianggap sudah menjadi epidemi. Bagian dari masalah ini adalah karena retorika pemerintahan sayap kanan, pandangan anti-afrika dan imigran telah memasuki stadion yang harusnya menjadi tempat menikmati pertandingan, namun asosiasi sepakbola tidak bisa melawannya jika melihat posisi pemerintah secara historis tidak serius menanggapi persoalan ini.

Pada tahun 2018. Ketua Umum FIGC, Gabrielle Gravina dikabarkan menggelar pertemuan darurat dengan Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Italia untuk membahas persoalan rasisme. Gravini mengungkapkan bahwa dirinya akan memberi usulan mengenai pengubahan Undang-Undang yang mengatur tindakan rasisme, namun hingga kini masalah rasisme belum menemukan titik terang di Italia. FIGC, sebagai otoritas sepakbola Italia, nampak tidak serius untuk menanggulangi masalah rasisme ini Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh penyelenggara Serie A Liga Italia.

Selain dalam sektor olahraga khususnya sepakbola, rasisme juga terjadi dalam sektor pekerjaan di Italia. Penempatan pekerja asing sejak tahun 2008 terus menurun sebesar 8,5% dibandingkan warga Italia sendiri. (ENAR, 2017, hal. 31). Hal ini adalah dampak dari peraturan-peraturan yang diperketat dan diperparah oleh pemberitaan media yang bias dan cenderung negatif terhadap kaum minoritas di Eropa. Menimbulkan persepsi dan stereotipe negatif terhadap mereka.

Kasus-kasus kejahatan terhadap migran yang didasari motif rasisme juga terjadi di negara pizza ini.. Pada tahun 2016, di Italia dilaporkan bahwa ada website dengan tajuk “*Crime of Immigrants*” yang menyebarkan berita-berita

palsu mengenai kejahatan atau perbuatan kriminal yang tidak pernah dilakukan oleh para migran di Italia. Bahkan di tahun yang sama, 2016, seorang pria asal Nigeria dan istrinya mengalami penghinaan rasial dan kemudian pria itu terbunuh setelah bereaksi terhadap penghinaan yang mereka terima. (bbc.com, 2016) Selain itu gerakan ekstrem kanan bernama Forza Nuova dilaporkan terlibat dalam serangan yang menargetkan pusat penampungan pencari suaka di bagian utara Italia, tepatnya di Treviso pada tahun 2015. (ENAR, 2017, hal. 44)

Italia memiliki sejarah yang kuat sebagai negara yang rasial, namun terlihat minimnya tindakan dari para elit dalam melakukan perubahan. Pemerintah Italia belum sepenuhnya berupaya untuk menghapus tindak rasisme karena hanya banyak bicara namun minim tindakan dan justru cenderung tutup telinga. Masyarakat Italia, dan para penggiat sepak bolanya, juga tampaknya tidak ada niatan untuk berubah. Bisa dibayangkan, tidak ada kampanye yang mampu mengajak seluruh elemen baik dalam masyarakat atau dalam industri sepak bola Italia untuk berubah dan menanggalkan rasisme seutuhnya.

2. **Jerman**

Rasisme dan imigran kini menjadi dua hal yang sensitif di Jerman. Jerman sebagai negara yang memiliki hukum pengungsian liberal menjadi tujuan utama para pengungsi. Hal ini mengakibatkan terus meningkatnya jumlah migran untuk mencari suaka di Jerman dari tahun ke tahun. Namun realita ini juga diiringi dengan tumbuhnya gelombang xenofobia dan anti imigran, hingga munculnya gerakan ekstrim kanan di Jerman yang mengedepankan retorika-retorika anti migran bahkan anti muslim. Seperti munculnya Pegida, sebuah organisasi ekstrim kanan yang menelurkan retorika-retorika bernada Islamophobia. Seperti kepanjangan dari nama organisasi tersebut, yakni *Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West In German*. (ENAR, 2016, hal. 12)

Gerakan Pegida ini dapat dikatakan berhasil menyebarkan kebencian berbentuk *Islamophobic* dan anti

migran menurut versi mereka, ke daratan Eropa. Cabang-cabang dari Pegida sudah tersebar dari Jerman, ke Austria, Bulgaria, Belgium, Czech Republic, Hungary, Italy, Sweden, Finland, France, Estonia, United Kingdom. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari figure.

Figure 1: Spread of far-right and vigilante groups 2015-16



Gambar 3. Spread at far-right and vigilante groups 2015-16

(sumber: (ENAR, 2016, hal. 13)

Terdapat sejumlah kasus kejahatan bermotif ekstrim kanan yang menyoroti akomodasi pencari suaka. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Polisi Federal Jerman, tercatat 1031 kasus kejahatan yang menyoroti akomodasi pencari suaka pada tahun 2015 serta 988 kasus pada tahun 2016. (Germany Federal Crime Police Office, 2016). Serangan bermotif rasisme terhadap migran, pencari suaka dan pengungsi pada dasarnya melibatkan banyak faktor. Hanya saja, banyak penyerangan dalam hal yang menarget akomodasi tetap belum terselesaikan.

Surat kabar Jerman, Die Zeit menginvestigasi 222 serangan terhadap akomodasi yang ditinggalkan para pencari suaka tahun 2015 dan menemukan hanya 4 kasus yang terselesaikan di pengadilan dan 8 kasus yang diproses kepolisian setempat. Hal itu hanya merepresentasikan 5%

dari seluruh kasus. Kepolisian hanya menemukan kurang dari seperempat tersangka dari setiap kasus. (ENAR, *Racism and Discrimination in Context of Migration in Europe*, 2017, hal. 43-44)

Terdapat juga kasus dimana 8 anggota dari gerakan Group Freital dituntut dengan tuduhan membentuk jaringan terorisme ekstrim kanan, dan bertanggungjawab atas 5 serangan bermotif rasis terhadap pengungsi dan akomodasinya, termasuk penggunaan bom dan bahan peledak. Sebagai tambahan, penelitian oleh Leipzig University mengindikasikan bahwa mereka yang memiliki paradigma ekstrem kanan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang baru ini.

Seperti yang terjadi pada tahun 2018, PEGIDA dan Partai sayap kanan Jerman yakni Alternative für Deutschland (AfD), mengorganisir demonstrasi anti-imigran di Chemnitz setelah seorang warga Jerman berusia 35 tahun tewas ditusuk oleh dua imigran dari Syria dan Iraq. Kelompok sayap kanan menyerang polisi, dan orang-orang yang dianggap imigran. “Kalian tidak diterima disini,” ujar para demonstran.

Selain itu terjadi juga kasus-kasus kekerasan seksual yang diperkirakan dilakukan oleh sebagian pencari suaka pada malam tahun baru 2015 di Cologne. Anggota dari kelompok-kelompok ekstrimis kanan, melakukan kejahatan dan kekerasan bermotif rasis dalam misinya ‘melindungi’ perbatasan negara. Demonstrasi skala besar yang tadinya menentang masuknya migran pun beralih menjadi kekerasan. Pada hal ini, meskipun belum terbukti terlibat langsung, gerakan ekstrim kanan seperti Pegida dapat dikatakan telah membuat iklim rasis dan membuka kesempatan kekerasan. (Koehler, 2017)

Selama ini pemerintah Jerman terus berupaya untuk menghentikan tindakan rasisme di negaranya. Seperti yang diberitakan Reuters, pada Senin 24 Agustus 2015, Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere menyerukan polisi untuk menindak tegas aksi radikal kelompok sayap kanan ekstrem atas terjadinya bentrok antara militan rayap

kanan dengan aparat di luar penampungan pengungsi pencari suaka di kota Heidenau. Ia mengatakan di saat yang sama adanya gelombang masyarakat meminta bantuan, terjadi peningkatan aksi kebencian, penghinaan dan kekerasan terhadap para pencari suaka, ini tidak pantas terjadi di negara Jerman. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan tidak pantas itu akan menghadapi kekuatan hukum. Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas juga mengatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap sikap rasisme dan xenofobia di negara itu.

Banyak politisi yang telah memperingatkan adanya peningkatan angka kekerasan terhadap warga asing dalam setengah tahun pertama 2015. Sebanyak 150 tindak pembakaran dan serangan lainnya tercatat terjadi di penampungan pengungsi. Beberapa politisi Jerman ingin memangkas anggaran untuk para pencari suaka dan mendesak negara Uni Eropa lainnya berbagi derita dengan menerima para pengungsi. Sementara beberapa politisi lainnya meminta penambahan anggaran untuk pemerintah lokal bagi tempat tinggal, penanganan dan pendidikan para pengungsi. Pemrosesan aplikasi pengungsian juga diminta dipercepat dari yang sebelumnya memakan waktu hingga delapan bulan. (Reuters, 2015)

Pada tahun 2018 Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, menyerukan bahwa warga Jerman harus 'bangkit dari sofa' dan melawan rasisme. Seruan itu keluar setelah terjadinya protes yang berujung pada kekerasan di Chemnitz, dan peristiwa dua orang polisi yang salam Nazi di Rosenheim, Jerman. Ia mengatakan bahwa Jika salam Hitler (Nazi) dilakukan sekali lagi di jalan, hal tersebut adalah aib bagi negara Jerman. Sejarah memberikan mandat kepada kita untuk berdiri menegakkan demokrasi," ujar Maas.

Maas mengajak warganya untuk melawan kelompok sayap kanan, karena jika kelompok tersebut tak dilawan maka merusak reputasi Jerman. Ia mengajak masyarakat untuk harus melawan neo-Nazi dan anti-Semites. Hanya dengan cara seperti itu reputasi Jerman tidak akan dirusak secara permanen karena kejahatan xenophobia. Mass juga

merespons aksi rasial yang terjadi di Jerman. Ia mengecam warganya yang dianggap malas melawan rasisme. Menurut Maas, generasi muda di Jerman sudah mendapatkan kebebasan tanpa harus berperang. Menteri Perekonomian Jerman, Peter Altmaier, juga menegaskan bahwa ia tidak bisa menerima begitu saja terkait rasisme yang dialami para imigran. (Kumparan, 2018)

Dalam melihat persoalan rasisme ini, banyak masyarakat Jerman melihatnya ini sebagai penyakit sosial utama di negaranya. Lebih dari separuh warga Jerman yang disurvei dalam jajak pendapat bulanan lembaga jajak pendapat Infratest Dimap mengklasifikasikan rasisme sebagai penyakit sosial utama. Pada saat yang sama, mereka mengatakan masalah-masalah sosial lain lebih penting daripada isu pencari suaka dan pengungsi. Tercatat 64 persen warga Jerman melihat rasisme sebagai masalah "besar" sampai "sangat besar". Lebih 50 persen menganggap rasisme sebagai penyakit sosial utama, tapi bukan isu terpenting. (DW, 2018)

Ketika ditanya pendapat mereka tentang masalah rasisme, 17 persen responden mengatakan bahwa rasisme adalah "masalah sangat besar" dan 47 persen mengatakan itu "masalah besar" (47 persen). Sekitar 35 persen responden menyatakan rasisme adalah masalah kecil atau bukan masalah sama sekali. Menariknya, orang dengan latar belakang imigran memiliki penilaian yang tidak jauh berbeda. 68 persen responden yang punya latar belakang migran mengatakan, rasisme masalah besar hingga sangat besar. Lebih banyak warga di Jerman bagian timur lah yang menilai rasisme sebagai masalah serius (71 persen) ketimbang warga di Jerman bagian barat (62 persen).

Secara keseluruhan, 62 persen responden menilai, integrasi warga migran di Jerman dalam jangka panjang "sangat sukses" atau "berhasil." Tetapi ada penilaian berbeda terhadap pendaatang yang tiba baru-baru ini di Jerman. Hanya 28 persen responden mengatakan bahwa integrasi warga migran yang tiba dalam beberapa tahun terakhir berhasil. 68

persen mengatakan bahwa integrasi untuk para pendatang di kelompok ini "tidak berhasil" atau "sangat tidak berhasil."

Namun ada perbedaan di kalangan pendukung partai politik. Sekitar 40 persen pendukung CDU/CSU merasa bahwa warga migran yang baru datang terintegrasi dengan baik, sedangkan hanya 33 persen dari Partai Kiri dan 30 persen dari pendukung Sosial Demokrat SPD menyatakan hal itu. Selain itu, pendukung SPD tampaknya jauh lebih nyaman dengan imigran yang sudah lama berada di Jerman. 77 pendukung SPD menyatakan integrasi telah berhasil baik untuk kelompok itu - dibandingkan dengan pendatang baru. Imigran "lama" kebanyakan berasal dari Turki atau Yunani, sementara imigran "baru" lebih banyak merupakan pengungsi dari negara-negara yang dilanda konflik seperti Suriah, Irak atau Afghanistan.

3. **Prancis**

Prancis bisa dikatakan sebagai negara paling multietnis di Eropa Barat. Lihat saja tim sepakbola Prancis, Tim Nasional Prancis benar-benar merepresentasikan keragaman etnis. Keberhasilan dalam meraih Piala Dunia dua kali, skuad tim nasional mereka dipenuhi oleh anak-anak migran. Pada piala dunia 1998, Deschamp membawa 19 dari 23 pemain berbau migran, entah itu anak dari seorang migran ataupun seorang migran tulen. Begitu juga dengan piala dunia 2018, Mbappe sebagai keturunan imigran sangat dielu-elukan karena kepiawaiannya dalam mencetak goal dan berhasil membawa Prancis juara dunia. Hal ini memperlihatkan seolah-olah Prancis sebagai negara yang ramah akan pendatang.

Namun pada faktanya, *commission nationale consultative des droits de l'homme* (CNCDDH) atau komisi hak asasi nasional Prancis dalam rilisnya menyatakan hal sebaliknya. Media *Le Monde* pada 22 Maret 2018 mempublikasikan data CNCDDH yang menyatakan bahwa islamophobia masih kuat di Prancis. 40% masyarakat Prancis percaya bahwa Islam merupakan ancaman terbesar mereka. Itu merupakan angka terbesar diantara minoritas

lainnya yang kesemuanya tidak ada yang mencapai kepercayaan melebihi angka 80%.

Montaigne Institute mempublikasikan tentang akses laki-laki muslim dan kepercayaan lainnya. Penelitian yang digawangi oleh Marie-Anne Valfort -dosen senior Sorbonne yang dipublikasikan *The Local* pada 9 Oktober 2015 menyebutkan bahwa di Prancis seorang lelaki muslim hanya memiliki kemungkinan 4,7% untuk dipanggil wawancara kerja dibandingkan 17,9% kesempatan yang diperoleh lelaki katolik. Fakta lain adalah bahwa pada pemilihan presiden terakhir, Marine Le Pen yang merupakan tokoh konservatif mendapatkan 7,6 juta pemilih atau 20% suara nasional. Guardian menyebut fakta tersebut sebagai rekor terbaru perolehan suara kandidat yang diusung partai berhaluan kanan tersebut.

Pada 21 September 2015, perusahaan kereta api nasional Prancis (SNCF) dinyatakan bersalah karena melakukan diskriminasi terhadap hampir 800 karyawan yang berasal dari Maroko. Mereka dipekerjakan hanya sebagai pekerja kontrak. Sementara kolega mereka, warga negara Prancis, dipekerjakan di bawah kontrak permanen dan gaji lebih baik, terlepas dari kenyataan bahwa mereka tampil dan memiliki kinerja yang sama dengan rekan Prancis mereka. (ENAR, 2017, hal. 39)

Kemudian pada tahun 2016 di, tercatat serangan yang menyasar akomodasi bagi para pencari suaka dengan cara membakar tempat tersebut. Pembakaran akomodasi yang kosong dimaksudkan untuk mencegah perpindahan para pencari suaka ke tempat tersebut. Seperti yang dilaporkan ENAR pada tahun 2015, krisis migran diperparah oleh persepsi negatif bahwa Muslim melakukan invasi ke Eropa dan membahayakan Eropa. Pada dasarnya kejahatan bermotif rasis di Eropa modusnya sangat variatif. Sepeerti graffiti bernada kebencian, pembakaran bahkan penembakan. (European Network Against Racism, 2017).

Menurut data pemerintah, pada 2015 jumlah laporan tindak kejahatan terhadap Muslim di Prancis naik lebih tiga kalinya, Peristiwa kebencian terhadap Islam dilaporkan

meningkat tajam pada tahun sebelumnya menjadi 429 dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya sebanyak 133 kejadian. Pelanggaran meningkat setelah serangan Charlie Hebdo pada Januari 2015 dan serangkaian serangan Paris di November yang menewaskan 130 orang. Sementara serangan terhadap masyarakat Yahudi Prancis yang dilaporkan sedikit menurun - meskipun jumlahnya tetap tinggi, lebih 800 kejadian. Pegiat HAM mengatakan kasus rasisme di Prancis dan skala serangan sebenarnya kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dipalorkan. Warga Yahudi di Prancis diperkirakan berjumlah 500.000 sampai 600.000 orang, yang terbesar di Eropa dan salah satu yang terbesar di dunia. (BBC, 2016)

Prancis adalah negara dengan pembatasan paling ekstrem terhadap kebebasan ekspresi masyarakat muslim. Padahal saat ini lima juta penduduk Muslim di Prancis dan ini merupakan jumlah minoritas Muslim terbesar di Eropa Barat. Sejak 2010, pemerintah Prancis telah melarang perempuan bercadar di ruang publik. Siapapun memaksa seorang wanita memakai kerudung akan dikenai denda 30.000 euro atau satu tahun penjara. Aturan itu berlaku di mana pun di seantero Prancis, baik di jalanan, di angkutan umum dan tempat publik lainnya. Mereka yang melanggar akan didenda sebesar USD 170. Larangan itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Hak Asasi Eropa (ECHR) karena dianggap melanggar kebebasan beragama.

Namun 2014 pengadilan yang sama kembali memberlakukan aturan itu. Lima tahun setelah aturan itu diberlakukan sejak 2011, sudah ada 1.500 kasus denda. Berdasarkan undang-undang pada 2014, seluruh siswa sekolah di Prancis dilarang menunjukkan atau memakai simbol-simbol agama, termasuk tanda salib dan peci Yahudi. Prancis memang negara yang menganut sistem sekuler, memisahkan urusan agama dan negara sejak undang-undang 1905.

Sejak pertengahan Agustus 2016, belasan kota di Prancis benar-benar melarang perempuan muslim pelesiran ke pantai mengenakan burkini. Perdana Menteri Prancis

ketika itu, Manuel Valls, membela keputusan 15 pemkot melarang penggunaan burkini. Valls mengklaim Prancis kini sedang bergelut dengan pertempuran budaya, di mana baju renang untuk muslimah sebagai simbol sebagai perbudakan perempuan dalam ideologi Islam. Ia beranggapan bahwa ini merupakan perjuangan untuk melawan Islam radikal, salah satunya dengan menyaring ke publik simbol-simbol yang digunakan seperti hijab, burka dan burkini. Valls menyatakan dukungannya pada pelarangan penggunaan hijab, burka dan juga burkini. Menurut dia ini bukan masalah rasis atau menggolong-golongkan agama, melainkan untuk kepentingan bersama, yakni menjaga Prancis tetap sebagai negara demokrasi sekuler.

Setelah era Zidane tahun 1998, kita memiliki gambaran bahwa Prancis adalah negara multietnis. Hal tersebut diperkuat dengan slogan yang muncul saat itu, "*black, blanc, beur*" (hitam, putih, arab) yang mewakili semua elemen tim nasional saat itu. Namun nyatanya selama 20 tahun telah berlalu, Prancis masih menyimpan bara rasisme. Prasangka, sisnisme dan ketidakpercayaan atas komitmen imigran atau minoritas menggambarkan betapa sulitnya rasisme dihapuskan. Faktanya, 20 tahun kemudian sepakbola menjadi salah satu dari sedikit jalan yang dapat dilewati para imigran untuk mengangkat harkatnya sebagai manusia.

Terpilihnya Emmanuel Macron sebagai presiden Prancis pada tahun 2017, yang mengalahkan Le Pen, kandidat dari partai sayap kanan nampaknya memberikan harapan dan angin segar terhadap imigran khususnya muslim. Emmanuel Macron nampak lebih moderat dan toleran terhadap Islam. Pada suatu kasus, Macron memperingatkan warganya agar tidak "memberi cap buruk" kepada Muslim atau menghubungkan Islam dengan terorisme. Pernyataan ini dibuat sesudah seorang perempuan Prancis menggugat seorang politisi sayap kanan yang mengkritiknya karena memakai hijab di tempat umum.

Peristiwa di gedung parlemen di Prancis timur itu terjadi dalam sebuah studi tur sekolah pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019. Saat itu Fatima menemani anaknya dalam tur sekolah. Saat debat parlemen berlangsung, seorang politikus dari partai berhaluan kanan, National Rally, yang dipimpin Marine Le Pen, melihat Fatima. Ia juga memerintahkan Fatima untuk mencopot hijabnya. Presiden Macron merasa perlu menanggapi dengan menyerukan pemahaman lebih baik mengenai agama Islam di Prancis. Ia juga mengecam apa yang disebutnya sebagai "jalan pintas" yang mengaitkan Islam dengan terorisme. Ia mengatakan bahwa komunalisme bukanlah terorisme.